

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penguatan ekonomi telah menjadi fokus utama politik luar negeri Indonesia beberapa waktu ke belakang. Melalui fokus diplomasi ekonomi, Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan ketidakstabilan ekonomi global dan proteksionisme yang terjadi.<sup>1</sup> Meskipun perdagangan internasional Indonesia masih didominasi oleh pasar tradisional terutama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan akses pasar ke wilayah *untapped market*, atau pasar non-tradisional.<sup>2</sup> Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia dalam pasar tradisional yang cenderung memiliki kompleksitas kebijakan perdagangan.

Dalam upaya diversifikasi pasar ini, pemerintah Indonesia membagi klasifikasi pasar tujuan ekspor menjadi dua istilah yaitu pasar tradisional dan pasar non-tradisional.<sup>3</sup> Pembagian wilayah tujuan ekspor ini juga dimanfaatkan untuk strategi diplomasi ekonomi Indonesia dimana pada wilayah pasar tradisional, kebijakan diplomasi ekonomi difokuskan pada strategi untuk mempertahankan pasar yang telah

---

<sup>1</sup>Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2024*. Video, Jakarta: CNN Indonesia, 2024.

<sup>2</sup> Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2016. Hlm 207.

<sup>3</sup> Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional." Hlm. 208

dibangun dan untuk pasar non-tradisional fokusnya adalah membuka akses pasar.

<sup>4</sup>Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan RI menjelaskan kawasan pasar tradisional antara lain adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan beberapa negara mitra utama. Sedangkan untuk pasar non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin.<sup>5</sup>

Perkembangan globalisasi yang pesat mendorong perubahan dalam dinamika ekonomi global. Permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat dari globalisasi membuat sebagian aktor internasional sadar dan kemudian berujung kepada penetapan kebijakan ekonomi proteksionis untuk mengatasi masalah yang ada. Kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) merupakan contoh bentuk kebijakan proteksionis yang memberikan syarat yang cukup ketat bagi tujuh komoditas yang dianggap berpotensi memiliki resiko deforestasi yaitu kayu, karet, kelapa sawit, kedelai, sapi, kopi dan kakao.<sup>6</sup> Hal ini diproyeksikan akan menjadi stagnasi bagi nilai ekspor Indonesia khususnya bagi komoditas pertanian mengingat beberapa negara yang menjadi anggota Uni Eropa yaitu Belanda, Jerman, dan Italia merupakan mitra utama bagi ekspor Indonesia.<sup>7</sup>

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, kejemuhan terhadap pasar tradisional di Eropa sudah mulai terlihat pada persentase peran nilai

<sup>4</sup> Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional." Hlm. 210.

<sup>5</sup> Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional." Hlm. 209.

<sup>6</sup> ICDX Group. *Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR): Dampaknya pada Industri Komoditas di Indonesia*. 9 Agustus 2024. <https://www.icdx.co.id>

<sup>7</sup> Sabaruddin, Dr. Sulthon Sjahril. "Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional." Hlm. 205-218.

ekspor nonmigas Indonesia terhadap ketiga negara yaitu Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam rentang waktu antara Januari hingga Mei 2024, nilai ekspor ke Belanda memiliki kontribusi sekitar 1,85% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia. Kemudian Jerman hanya berkontribusi sekitar 0,96% dan disusul dengan Italia yang menyumbang 0,98% dari total ekspor nonmigas Indonesia. Angka tersebut masih cukup kecil jika dibandingkan dengan ekspor Tiongkok yang memiliki kontribusi terhadap total ekspor nonmigas tertinggi bagi Indonesia yaitu sekitar 22,92%.<sup>8</sup>

Adanya kemungkinan stagnasi maupun penurunan nilai perdagangan Indonesia terhadap pasar tradisional memungkinkan Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional.<sup>9</sup> Afrika merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat dalam beberapa tahun ke belakang memiliki potensi untuk dijadikan mitra perdagangan internasional alternatif bagi Indonesia. Pengembangan pasar ekspor Indonesia ke Afrika diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja.<sup>10</sup> Dalam pasal ini, Kemendag RI menginstruksikan pengembangan pasar ekspor Indonesia melalui tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor yang dimana organisasi ini secara khusus

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Eskpor dan Impor Indonesia Mei 2024*. Berita Resmi, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

<sup>9</sup> Renggani, Siti Aisyah dan Trias Dewi. "Determinants of Indonesia Non-Oil and Gas Exports to Non-Traditional Market." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2021: 1136

<sup>10</sup> Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. *Laporan Kinerja Tahun 2023*. Dokumen, Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2024. Hlm. 5

menargetkan dan melaksanakan pengembangan pasar ke tiga kawasan yaitu Amerika, Asia Pasifik, dan Afrika.<sup>11</sup>

Berdasarkan data dari *African Development Bank*, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil benua Afrika diproyeksikan berada di angka 3,8% pada tahun 2024, dan 4,2% pada tahun 2025 yang menjadikan benua Afrika sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua setelah Asia.<sup>12</sup> Dengan memiliki jumlah populasi yang sangat signifikan dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar dan juga pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan berdasarkan proyeksi 4,2% pada tahun 2025, perluasan pasar ke kawasan Afrika merupakan strategi yang cukup prospektif dalam upaya diversifikasi pasar internasional Indonesia. Perluasan pasar Indonesia ke kawasan Afrika ini merupakan bagian dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia yang telah menjadi pilar utama diplomasi ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir.<sup>13</sup> Pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan pada *concrete deliverables* atau kerja nyata bagi kepentingan nasional yang dikomandoi langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2014-2024 Retno Marsudi.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam membuka peluang kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial dalam

---

<sup>11</sup> Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. *Laporan Kinerja Tahun 2023*. Hlm. 15.

<sup>12</sup> African Development Bank Group. *Africa dominates list of the world's 20 fastest-growing economies in 2024- African Development Bank says in macroeconomic report*. 16 Februari 2024. <https://www.afdb.org/en> (diakses Januari 16, 2025).

<sup>13</sup> Indonesia.go.id. *Reputasi Menyala Indonesia di Panggung Dunia*. 29 September 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8640/reputasi-menyala-indonesia-di-panggung-dunia?lang=1> (diakses Mei 5, 2025)

<sup>14</sup> Indonesia.go.id. *Reputasi Menyala Indonesia di Panggung Dunia*.

rangka membuka akses pasar baru.<sup>15</sup> Forum ini menjadi keran pembuka kerjasama ekonomi Indonesia baik secara multilateral maupun bilateral dengan negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Dalam bidang perekonomian, penyelenggaraan forum ini dimaksudkan untuk menggali potensi bisnis antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara potensial di Afrika.

Pelaksanaan forum IAF ke-1 pada tahun 2018 ini menghasilkan kesepakatan bisnis dengan total sebesar USD 1,3 miliar.<sup>16</sup> Selain kesepakatan bisnis, pertemuan ini juga membuka jalan bagi kemudahan regulasi dan pengurangan *trade barriers* dalam perdagangan Indonesia ke Afrika ataupun sebaliknya. IAF 2018 memfasilitasi pembahasan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dengan Mozambik, Tunisia, Angola, Kenya, dan Afrika Selatan guna mempermudah perdagangan internasional diantara kedua belah pihak dengan skema pengurangan ataupun penghapusan tarif terhadap suatu komoditas barang atau jasa.<sup>17</sup> Hasilnya pada 27 Agustus 2019, Indonesia dan Mozambik menandatangani *Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement* (IM-PTA) yang memberikan penurunan pos tarif terhadap 200 lebih produk non-migas dari masing-masing negara.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Kemenko Perekonomian Indonesia. *Forum Indonesia Afrika, Semangat Membangun dan Maju Bersama Kawan Lama*. 10 April 2018. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1445/forum-indonesia-afrika-semangat-membangun-dan-maju-bersama-kawan-lama> (diakses Mei 5, 2025)

<sup>16</sup> African Growth and Opportunity Act. *The concrete result of IAF 2018: Strengthening Indonesia-Africa Partnership*. 12 April 2018. <https://www.tralac.org> (diakses Januari 17, 2025).

<sup>17</sup> African Growth and Opportunity Act. *The concrete result of IAF 2018: Strengthening Indonesia-Africa Partnership*. 12 April 2018. <https://www.tralac.org> (diakses Januari 17, 2025)

<sup>18</sup> Aseilla, Langgeng Larasati dan Dike. "Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia di Afrika Melalui Preferential Trade Agreement Indonesia Mozambik." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2021: 50.

Selain fokus pada upaya perluasan pasar di bidang perdagangan non-migas, Indonesia juga melakukan upaya perluasan pasar ke kawasan Afrika melalui skema investasi. Dalam hal ini, Indonesia akan berinvestasi sebesar USD 1,5 miliar dalam pengembangan energi panas bumi di negara Kenya melalui perusahaan BUMN PT. Pertamina.<sup>19</sup> Melalui investasi ini, perusahaan BUMN Indonesia juga diharapkan dapat mengembangkan pasar ke wilayah Afrika termasuk dalam upaya pengembangan energi hijau.

Kawasan Afrika merupakan kawasan yang menawarkan potensi besar bagi pengembangan pasar non-tradisional Indonesia karena kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis dan juga jumlah populasi yang sangat besar. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Indonesia mengingat masifnya tantangan yang terjadi di tengah ketidakstabilan geopolitik dunia yang membuat Indonesia harus melakukan upaya diversifikasi pasar. Diplomasi ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan diplomasi ekonomi ini menjadi pilar utama bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar baru yang dibuktikan dengan 27 perjanjian perdagangan internasional yang sudah ditandatangani hingga tahun 2024 yang di dalamnya termasuk perjanjian perdagangan IM-PTA.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kementerian ESDM. *Indonesia - Kenya Perkuat Kerja Sama Sektor Energi*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023.

<sup>20</sup> Kementerian Luar Negeri . *Diplomasi Ekonomi Salah Satu Wujud Konkret Dalam Kebijakan Luar Negeri*. 8 Januari 2024. <https://arsipportal.kemlu.go.id/portal/id/read/5665/berita/diplomasi-ekonomi-salah-satu-wujud-konkret-dalam-kebijakan-luar-negeri> (diakses Mei 6, 2025).

Pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di wilayah Afrika dijalankan dengan cukup masif di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas akses pasar baru di kawasan tersebut dalam rangka memperkuat ekonomi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa tantangan dihadapi oleh Indonesia dalam pengembangan pasar di wilayah ini karena Afrika merupakan kawasan yang rentan terhadap ketidakstabilan politik dan juga tantangan sosial lainnya.

Selain itu, meskipun pelaksanaan diplomasi ekonomi di Afrika telah dilaksanakan dalam beberapa tahun ke belakang, peneliti menemukan bahwa penetrasi akses pasar non-tradisional masih belum optimal serta belum terpadunya kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang membuat diplomasi ekonomi Indonesia tidak dapat berjalan dengan optimal.<sup>21</sup> Kedua faktor ini disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana bentuk diplomasi ekonomi dalam upaya perluasan pasar non-tradisional dari pemerintah Indonesia yang selama ini telah mencoba meningkatkan diplomasi ekonomi di Kawasan Afrika.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan konsistensi pertumbuhan PDB riil yang cukup prospektif, kawasan Afrika dipandang memiliki kapabilitas untuk menjadi mitra perdagangan alternatif bagi Indonesia sebagai upaya mengurangi stagnansi dalam pasar tradisional yang semakin

---

<sup>21</sup> Kemenko Perekonomian Indonesia. “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.” Dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024*, oleh Pemerintah Republik Indonesia, II.13. Jakarta: Kemenko Perekonomian Indonesia, 2020.

kompleks. Diselenggarakannya IAF pertama pada tahun 2018 dan juga IAF kedua pada tahun 2024 merupakan penanda awal bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menggaet Afrika sebagai mitra perdagangan internasional. Namun perluasan pasar di Afrika ini masih cenderung belum optimal jika mengacu pada laporan dalam RPJMN 2020-2024 yang menyatakan bahwa penetrasi pasar non-tradisional masih belum mencapai titik maksimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia terutama pasca pelaksanaan IAF pertama pada tahun 2018 dan IAF kedua pada tahun 2024 dalam perluasan pasar di kawasan Afrika.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah “Bagaimana Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam upaya perluasan pasar non-tradisional di Kawasan Afrika?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam perluasan pasar non-tradisional di kawasan Afrika khususnya pasca IAF 2018-2024.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan ataupun menambah wawasan baru bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Hubungan

Internasional tentang upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pasar non-tradisional di Kawasan Afrika. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literature tentang diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Afrika.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi pemerintah Indonesia ataupun kelompok pengusaha lokal tentang potensi dari pasar Afrika dan juga strategi serta promosi yang efektif diterapkan dalam mengekspansi pasar di kawasan tersebut. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan hingga menjalankan kebijakan diplomasi ekonomi khususnya dalam perdagangan internasional di Afrika.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Dalam mendukung penulisan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka pada beberapa penelitian terdahulu untuk menemukan perbedaan dengan topik yang diteliti serta dapat berkontribusi pada pembaharuan penelitian. Terdapat lima studi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian perluasan pasar non-tradisional Indonesia di kawasan Afrika dan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian ini.

Pertama, artikel jurnal yang berjudul "*Trade liberalization policy and economic growth in Africa: A threshold analysis*" oleh Joseph Osaro Denwi, Nenubari John Ikue, Joseph jite Onodjaefe, dan Mtomabari Simeon.<sup>22</sup> Penelitian dalam artikel ini

---

<sup>22</sup> Joseph Osaro Denwi, Nenubari John Ikue, Joseph jite Onodjaefe, dan Mtomabari Simeon. "Trade liberalization policy and economic growth in Africa: A threshold analysis." *Intenational Journal of Research in Business and Social Science* , 2022: 178-188.

memuat bahasan tentang analisis dampak dari kebijakan liberalisasi perdagangan yang telah dilakukan di 42 negara Afrika selama periode 1995-2018. Penelitian yang ada dalam artikel ini ditujukan untuk melihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Afrika khususnya pada 42 negara yang menjadi fokus penelitian. Dalam artikel ini, analisis yang dilakukan juga didasarkan pada eksplorasi nilai ambang (*threshold*) untuk melihat dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan liberalisasi perdagangan di Afrika.

Dengan menggunakan data dari *Penn World Tables*, *database IMF*, dan *World Bank's World Development Indicators*, artikel ini menggunakan metode analisis *Pooled Mean Group* (PMG) untuk menganalisis hubungan antara liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Afrika. Artikel ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif dalam kebijakan liberalisasi perdagangan ini bagi Afrika hingga pada batas nilai ambang (*threshold*) yang jika melampaui nilai tersebut maka kebijakan ini akan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Afrika. Temuan lainnya dalam penelitian ini adalah terdapat pada stabilitas harga domestik dan pertumbuhan populasi namun daya saing sumber daya manusia masih belum cukup efektif untuk bersaing secara global.

Artikel ini berkontribusi dalam memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan perdagangan di Afrika mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Namun perbedaannya disini adalah terdapat pada fokus penelitian. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan liberalisasi perdagangan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Afrika dan juga faktor-faktor pengaruh lainnya. Sedangkan

penelitian yang peneliti tulis membahas bagaimana strategi dan upaya perluasan perdagangan internasional di kawasan Afrika.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini sangat berkontribusi bagi penelitian yang peneliti tulis khususnya pada proses analisis strategi dan juga potensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar non-tradisional di wilayah Afrika. Dengan mengetahui faktor-faktor dan juga indikator pertumbuhan ekonomi di Afrika berdasarkan kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara Afrika, peneliti dapat menganalisis bagaimana strategi yang telah dilakukan dan juga yang belum dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya perluasan pasar non-tradisional di kawasan ini.

Kedua, artikel yang berjudul "*International trade and economic growth in Africa: The role of the digital economy*" oleh Simon Abendin dan Pingfan Duan.<sup>23</sup> Penelitian dalam artikel ini menganalisis bagaimana dampak dari perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi di Afrika dengan mempertimbangkan peran ekonomi digital. Artikel ini menggunakan data panel tahunan yang mencakup indikator terkait perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi dan beberapa variabel yang terkait dengan ekonomi digital dari 53 negara Afrika selama periode 2000-2018. Data tersebut kemudian dianalisis dengan beberapa model estimasi untuk memahami

---

<sup>23</sup> Duan, Simon Abendin dan Pingfang. "International trade and economic growth in Africa: The role of the digital economy." *Cogent Economics & Finance*, 2021: 1-25.

hubungan antara perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan peran ekonomi digital.

Artikel ini memuat temuan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Berdasarkan model *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS), perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan hanya jika variabel digitalisasi diperhitungkan. Temuan lainnya menggambarkan bahwa pengaruh perdagangan internasional dan ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika cukup bervariasi berdasarkan masing-masing sub-region di kawasan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Afrika seperti investasi asing, perkembangan keuangan, dan pembentukan modal tetap bruto.

Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang peneliti tulis juga terdapat pada fokus penelitian. Artikel ini berfokus dalam menganalisis pengaruh dari perdagangan internasional dan juga ekonomi digital bagi pertumbuhan ekonomi Afrika. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar non-tradisional di kawasan Afrika. Meskipun begitu, artikel ini tetap memiliki kontribusi yang signifikan bagi penelitian ini khususnya dalam melihat peluang perdagangan internasional di kawasan Afrika.

Kontribusi yang signifikan dari artikel ini yaitu terdapat pada temuan-temuan yang telah dianalisis. Temuan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Afrika merupakan peluang bagi Indonesia

untuk memperluas perdagangan di kawasan tersebut dan didukung dengan strategi yang mempertimbangkan aspek digitalisasi. Kemudian temuan bahwa investasi asing juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Afrika juga bisa diperhatikan karena Indonesia saat ini juga telah melakukan kerjasama investasi dengan beberapa negara Afrika.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul *”Determinants of Indonesia non-Oil and Gas Exports to non-Traditional Market”* tahun 2021 oleh Siti Aisyah dan Trias Dewi Renggani.<sup>24</sup> Artikel ini membahas bagaimana daya saing ekspor komoditas non migas Indonesia dapat bersaing dalam pasar non-tradisional. Artikel ini menyoroti bagaimana pasar non-tradisional dapat dijadikan alternatif yang progresif untuk meningkatkan ekspor produk non-migas Indonesia. Namun, ekspansi pasar non-tradisional ini harus diiringi dengan strategi yang selektif dalam mencari mitra ekspor alternatif. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis pengaruh dari beberapa variabel di pasar non-tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, keterbukaan ekonomi, dan nilai tukar terhadap US Dollar dari kegiatan perdagangan produk non-migas dengan negara mitra alternatif.

Dengan menggunakan beberapa metode analisis statistik, artikel ini menemukan bahwa pertumbuhan PDB dari negara mitra memiliki pengaruh positif ekspor non-migas Indonesia. Selain itu, tingkat inflasi yang rendah juga mempengaruhi

---

<sup>24</sup> Renggani, Siti Aisyah dan Trias Dewi. “Determinants of Indonesia Non-Oil and Gas Exports to Non-Traditional Market.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2021: 1136.

ekspor Indonesia karena negara tujuan akan memiliki kapasitas untuk mengimpor dari Indonesia. Keterbukaan ekonomi juga memiliki pengaruh bagi eksposur terhadap pasar internasional yang kemudian membuka peluang ekspor Indonesia. Kemudian kekuatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang tujuan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing harga produk Indonesia di pasar internasional.

Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis terutama pada aspek fokus penelitian. Artikel ini cenderung berfokus pada analisis mengenai daya saing produk non-migas Indonesia dalam pasar internasional terutama dalam pasar non-tradisional. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian pada bagaimana upaya peningkatan perdagangan internasional Indonesia di pasar-non tradisional kawasan Afrika dengan melihat faktor-faktor dan juga strategi pemerintah Indonesia. Namun, variabel-variabel yang dianalisis dalam artikel ini dapat berkontribusi bagi penelitian yang ditulis khususnya untuk mengetahui besaran peluang perdagangan Indoensia di dalam pasar-non tradisional Afrika.

Oleh karena itu, artikel ini sangat berkontribusi bagi penelitian yang ditulis khususnya dalam temuan-temuan yang dianalisis bahwa beberapa variabel seperti PDB, keterbukaan ekonomi, tingkat inflasi, dan juga nilai tukar sangat mempengaruhi daya saing produk non-migas Indonesia untuk memasuki pasar-non tradisional. Temuan dalam artikel ini nantinya akan menjadi salah satu acuan penulis untuk mengukur seberapa besar peluang pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perluasan pasar non-tradisional di kawasan Afrika.

Keempat, artikel yang berjudul *Indonesia's Economic Diplomacy to Africa: Challenge and Opportunities* oleh Lusia Novita Sari tahun 2023.<sup>25</sup> Artikel ini membahas tentang diplomasi ekonomi ke Afrika dengan mengukur tantangan serta peluang yang potensial di kawasan tersebut. Artikel ini menyoroti peluang Indonesia di Afrika dengan melakukan kerjasama di bidang non-tradisional seperti industri farmasi, pembuatan dan pengembangan kendaraan listrik, serta pengembangan energi terbarukan di Afrika. Namun, hal ini masih memiliki kendala karena beberapa tantangan yang ada seperti kurangnya representasi diplomatik yang hanya memiliki 16 kedutaan di 54 negara Afrika, keengganan sektor swasta yang lebih memilih negara maju sebagai mitra bisnis, serta kurangnya kebijakan nasional yang terintegrasi untuk diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika.

Artikel ini menjelaskan bahwa Indonesia dapat memfokuskan diplomasi ekonomi di sektor-sektor strategis dan memberikan bantuan teknis kepada negara Afrika untuk meningkatkan hubungan bilateral. Artikel ini juga menyoroti bahwa perjanjian pedagangan preferensial seperti IM-PTA dengan Mozambik dapat dijadikan model kerjasama bagi negara Afrika lainnya. Selain itu, artikel ini juga membahas pengembangan *roadmap* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan diplomasi ekonomi di Afrika dan juga diperlukan evaluasi dalam jangka panjang terhadap hasil dari kerjasama serta rencana aksi lima tahunan di

---

<sup>25</sup>Sari, Lusia Novita. "Indonesia's Economic Diplomacy to Africa: Challenge and Opportunities." *THC INSIGHTS*, 2023: 1-5.

berbagai sektor sebagai upaya jangka menengah diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika.

Artikel ini cenderung menyoroti bagaimana tantangan yang membuat Indonesia masih belum optimal melakukan diplomasi ekonomi di Afrika walaupun Afrika memiliki potensi yang cukup besar dalam menjadi mitra ekonomi. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut artikel ini mencoba menguraikan peluang dalam sektor strategis yang belum banyak tersentuh dalam kerjasama bilateral maupun ekonomi. Sedangkan penelitian yang ditulis membahas upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pasar-non tradisional di Afrika dan kemudian dianalisis menggunakan tipologi diplomasi ekonomi oleh Kishan S. Rana.

Meskipun demikian, artikel ini berkontribusi pada penelitian yang ditulis terutama dalam hal peluang kerjasama yang dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi upaya-upaya terbaru yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pasar non-tradisional di Afrika.

Kelima, peneliti menggunakan artikel yang berjudul "*Penjajakan Indonesia-Southern African Custom Union Preferential Trade Agreement Dalam Upaya Memperluas Peluang Pasar Non-Tradisional dan Studi Simulasi Perdagangan Bebas Bilateral RI-Namibia*" oleh Sulthon Sjahril Sabaruddin tahun 2022.<sup>26</sup> Artikel ini bertujuan untuk menilai peluang Indonesia dalam memperluas pasar non-tradisional di

---

<sup>26</sup> Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Penjajakan Indonesia-Southern African Customs Union Preferential Trade Agreement Dalam Upaya Memperluas Peluang Pasar Non-Tradisional dan Studi Simulasi Perdagangan Bebas Bilateral RI-Namibia." *Journal of Trade Development and Studies*, 2022: 42-60.

Afrika dengan pengusulan kerjasama perdagangan bebas *Southern African Costums Union* (SACU) dengan skema *Preferential Trade Agreement* (PTA). Artikel ini menggambarkan bahwa RI-SACU PTA telah diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia sejak 2017 dan masih belum mendapatkan respon positif dari SACU.

Artikel ini menemukan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya layak untuk dilanjutkan karena Indonesia telah menjadi mitra dagang yang penting bagi beberapa negara-negara SACU yang diukur berdasarkan nilai perdagangan pada tahun 2020 sebesar USD 1.26 miliar. Temuan lainnya adalah Indonesia memiliki kecocokan dalam kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara SACU yang dibuktikan data *Trade Complementarity Index* (TCI) dengan nilai kecocokan di angka 55.1 pada tahun 2020. Artikel ini juga mencoba mensimulasikan kerjasama PTA dengan skema pengurangan tarif antara Indonesia dengan Namibia dan menggambarkan keuntungan ekspor non-migas dari perjanjian ini sebesar USD 211.565. Sayangnya liberalisasi perdagangan RI-SACU maupun RI-Namibia ini menghadapi tantangan ketidakpastian karena perjanjian SACU memuat peraturan yang cukup ketat.

Meskipun artikel ini juga membahas upaya perluasan pasar non-tradisional Indonesia, namun perbedaan dengan penelitian yang ditulis terdapat pada fokus penelitian. Artikel ini cenderung berfokus kepada skema dan simulasi liberalisasi perdagangan antara RI-SACU dan RI-Namibia, sedangkan penelitian yang ditulis akan membahas bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia yang kemudian dianalisis untuk menemukan hambatan dan juga peluang perluasan pasar di Afrika.

Namun, artikel ini tetap memiliki kontribusi terhadap penelitian yang ditulis khususnya dalam mengetahui tantangan dan hambatan yang ada dalam Kawasan Afrika sebagai *potential partner* bagi pasar perdagangan internasional alternatif Indonesia. Temuan seperti adanya pengaruh regulasi dari perjanjian SACU pada tahun 2022 yang melarang anggotanya untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan negara anggota lainnya tentu akan memberikan kontribusi positif dalam penelitian yang ditulis.

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian, peneliti menggunakan konsepsi diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Kishan S. Rana. Rana menjelaskan bahwa terdapat setidaknya lima faktor kunci kesuksesan diplomasi ekonomi oleh suatu negara. Dalam hal ini, Rana menekankan sinergi antara jaringan diplomatik yang dikoordinatori kementerian luar negeri dengan lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan harus diharmonisasi untuk mencapai tujuan nasional.

Rana menjelaskan bahwa secara umum diplomasi merupakan ekspresi dari sebuah negara yang berakar dari visi, efektivitas, organisasi, dan motivasi rakyat serta lembaganya, termasuk para pemimpin dan masyarakat sipil pada umumnya.<sup>27</sup> Hal ini mengisyaratkan bahwa diplomasi ekonomi adalah bentuk ekspresi sebuah negara untuk

---

<sup>27</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Dalam *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations Second Edition*, oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, 201-220. London: Ashgate Publisher, 2007. Hlm 202.

bisa mencapai keuntungan ekonomi nasional yang berakar pada kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lain melalui dinamika hubungan eksternalnya.

### 1.7.1 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan aspek penting bagi sebuah negara untuk menentukan keefektifan dari ekonomi politik dalam hubungan internasional. Berakhirnya perang dingin dan kemajuan globalisasi menjadi momentum diplomasi ekonomi menjadi prioritas sebagian besar negara di dunia dalam menanggapi permasalahan yang semakin kompleks seperti krisis finansial dan diikuti dengan resesi ataupun permasalahan perubahan iklim.<sup>28</sup>

Donna Lee dan Brian Hocking menjelaskan bahwa konsep eksplisit diplomasi ekonomi muncul pada tahun 1980-an ketika masalah-masalah ekonomi seperti krisis minyak 1970-an, penurunan hegemoni Amerika, utang negara berkembang pada tahun 1980-an dan seterusnya, krisis keuangan Asia Timur pada tahun 1990-an, dan lain sebagainya muncul menjadi permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi dunia.<sup>29</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian memberikan gambaran bahwa hubungan ekonomi internasional memiliki signifikansi yang cukup besar dalam perubahan pemahaman tentang cara kerja dunia. Hal ini juga yang kemudian memaksa para intelektual mengubah pandangan mereka tentang cara kerja dunia.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Woolcock, Nicholas Bayne dan Stephen. *The New Economic Diplomacy: Decision-making and negotiation in international relations edisi keempat*. New York: Routledge, 2017. Hlm. 1

<sup>29</sup> Hocking, Donna Lee dan Brian. “Economic Diplomacy.” *The International Studies Encyclopedia Vol.II*, 2010. Hlm. 1216-1227.

<sup>30</sup> Hocking, Donna Lee dan Brian. “Economic Diplomacy.”. Hlm.1228.

Menurut Lee dan Hocking, konsep diplomasi ekonomi awalnya berkembang dengan hanya berfokus pada penggunaan instrumen diplomasi tradisional antar pemerintah yang melibatkan kementerian luar negeri untuk mencapai tujuan ekonomi di negara asing ataupun ekonomi dunia.<sup>31</sup> Diplomasi ekonomi kemudian berkembang dengan pendekatan baru menggunakan konsep *National Diplomatic System* (NDS) yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekonomi untuk terlibat dalam proses diplomasi ekonomi yang dikoordinir oleh kementerian luar negeri dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait hal yang ingin dicapai.<sup>32</sup> Hal ini berkaitan dengan perubahan sistem ekonomi global.

Linda Yueh dalam tulisannya yang berjudul *Economic Diplomacy in The 21<sup>st</sup> Century: Principle and Challenges*, menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi menghadapi beberapa tantangan seperti sistem dunia yang multipolar pada abad ke 21 ini. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi harus memiliki keterbukaan terhadap kepentingan komersial serta harus berdasarkan politik luar negeri yang strategis dan sistem aturan untuk menghindari ketegangan antar kekuatan besar.<sup>33</sup> Yueh menggambarkan bahwa diplomasi ekonomi harus didasarkan pada kepentingan ekonomi domestik yang memiliki sinkronisasi dengan kebijakan ekonomi luar negeri dalam rangka mendorong dampak distribusional dalam masayarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Hocking, Donna Lee dan Brian. “Economic Diplomacy.” Hal.1121

<sup>32</sup> Hocking, Donna Lee dan Brian. “Economic Diplomacy.” Hal.1123

<sup>33</sup> Yueh, Linda. “Economic Diplomacy in the 21st Century: Principle and Challenges.” LSE. Agustus 2020. <https://www.lse.ac.uk/ideas/publications/old-updates/economic-diplomacy-in-the-21st-century-principles-and-challenges> (diakses Maret 17, 2025).

<sup>34</sup> Yueh, Linda. “Economic Diplomacy in the 21st Century: Principle and Challenges.”

Dengan definisi tersebut, diplomasi ekonomi pada praktiknya akan memiliki karakteristik tertentu bagi masing-masing negara karena setiap negara akan mendasarkan kebijakan ekonomi luar negeri mereka berdasarkan kondisi domestik. Selain itu, diplomasi ekonomi suatu negara juga akan lebih efektif jika melibatkan aktor non-pemerintah untuk mencapai kepentingan ekonomi yang komprehensif. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock menggambarkan dalam bukunya yang berjudul *The New Economic Diplomacy: Decision making and negotiations in international relations fourth edition* bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya sekitar subjek akademis tetapi diplomasi ekonomi akan lebih mudah dipahami berdasarkan praktiknya oleh aktor negara maupun non-negara yang diwakili oleh agen resmi dari pemerintah yang dalam hal ini merupakan seorang diplomat.<sup>35</sup>

Dengan adanya dikotomi definisi diplomasi ekonomi mulai dari awal kemunculan hingga pada perubahan tata cara kerja ekonomi dunia saat ini, penulis mencoba untuk menganalisis upaya perluasan pasar non-tradisional Indonesia di Afrika menggunakan faktor kesuksesan diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Kishan S. Rana. Melalui tulisan *Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries* yang dirilis dalam buku *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiations in International Relations Second Edition*, Rana menjelaskan diplomasi ekonomi melalui perseptif dan pengalaman negara-negara berkembang

---

<sup>35</sup> Woolcock, Nicholas Bayne dan Stephen. *The New Economic Diplomacy: Decision-making and negotiation in international relations fourth edition*. New York: Routledge, 2017, 2.

yang berbeda-beda dalam menghadapi tantangan globalisasi dan peluang ekonomi global.<sup>36</sup>

Pemilihan konsepsi diplomasi ekonomi berdasarkan pengalaman negara berkembang oleh Kishan S. Rana dalam penelitian ini merupakan relevansi dari status Indonesia sebagai negara berkembang. Pengelompokan ini didasarkan pada definisi subkategori negara berkembang yang dijelaskan oleh Organisation for Economic and Cooperation and Development (OECD) dengan memberikan klasifikasi *Lower Middle Income Country* (LMIC) dan *Upper Middle Income Country* (UMIC).<sup>37</sup> Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia pada tahun 2023 masuk ke dalam kategori UMIC sesuai dengan pengklasifikasian OECD.<sup>38</sup> Dari segi konseptual, Rana menjelaskan bahwa perluasan pasar itu juga termasuk ke dalam prioritas diplomasi ekonomi dan merupakan salah satu kunci kesuksesan diplomasi ekonomi.<sup>39</sup>

Diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh sebuah negara harus berdasarkan kepentingan ekonomi nasional. Hal ini dapat dicapai dengan menyelarasakan sinergi antara jaringan diplomatik atau perwakilan sebuah negara di luar negeri dengan kementerian ataupun pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan diplomasi

---

<sup>36</sup> Rana, Kishan S. “Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries.” Hal.202.

<sup>37</sup> Bappenas. *Strategi Transformasi Pembiayaan Pembangunan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025-2029*. Jakarta: Direktorat Pendanaan Bilateral, 2023. Hlm. 8.

<sup>38</sup> Bappenas. *Strategi Transformasi Pembiayaan Pembangunan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025-2029*. Hlm. 8.

<sup>39</sup> Rana, Kishan S. “Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries.” Hal.204.

ekonomi. Oleh karena itu Rana memberikan beberapa komponen kunci yang dapat dijadikan pertimbangan kesuksesan diplomasi ekonomi.

*Pertama*, pendekatan ekonomi luar negeri itu tidak hanya bergantung pada kementerian luar negeri tetapi juga harus lebih inklusif melibatkan kementerian, lembaga, ataupun pemangku kepentingan terkait untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi luar negeri dengan kepentingan nasional.<sup>40</sup> Menurut Rana, keterlibatan urusan ekonomi luar negeri itu tidak hanya urusan negara saja tetapi setidaknya melibatkan berbagai pihak seperti unit bisnis, asosiasi industri dan kamar dagang, sektor keuangan, lembaga riset, universitas, maupun think tanks.<sup>41</sup>

Dalam penerapannya, Rana memberikan contoh bagaimana pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri itu dijalankan secara lebih inklusif dengan cara membentuk kelompok penasihat yang terdiri dari para pebisnis untuk memandu jangkauan ekonomi eksternal ataupun memandu mobilisasi investasi luar negeri.<sup>42</sup> Selain itu, Rana juga menjelaskan bahwa diperlukan juga pembentukan kelompok atau organisasi yang terdiri dari para pelaku bisnis untuk saling bertukar pikiran mengenai peluang-peluang baru dan juga pelaksanaan pertemuan serta pelibatan *think-tank* dan akademisi untuk bekerja sama dengan pemimpin dalam memberikan masukan untuk negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan calon mitra diplomasi ekonomi.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal.202.

<sup>41</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal.202.

<sup>42</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal.202.

<sup>43</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 202.

*Kedua*, harus ada keselarasan antara struktur urusan luar negeri dan manajemen ekonomi eksternal harus diselarasakan dan diintegrasikan. Rana menjelaskan bahwa komponen ini perlu dilakukan karena di beberapa kasus diplomasi ekonomi negara-negara berkembang, terdapat perselisihan kewenangan antar lembaga yang membuat pelaksanaan diplomasi ekonomi tidak berjalan optimal.<sup>44</sup> Menurut Rana struktur urusan luar negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian luar negeri, harus diintegrasikan dengan kepentingan ekonomi negara terutama manajemen ekonomi eksternal yang dijalankan oleh kementerian-kementerian ekonomi sehingga pelaksanaan diplomasi ekonomi tidak dijalankan secara terpisah oleh masing-masing kementerian yang pada akhirnya merugikan kepentingan nasional secara keseluruhan.<sup>45</sup>

Rana menjelaskan bahwa penyelarasan struktur urusan luar negeri dan manajemen ekonomi eksternal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pembentukan lembaga khusus sebagai hasil dari mekanisme koordinasi antar kementerian luar negeri dan kementerian-kementerian ekonomi yang berhak melakukan promosi perdagangan internasional.<sup>46</sup> Selain itu, penggabungan kementerian juga menjadi opsi penyelarasan urusan luar negeri dan ekonomi eksternal dengan cara membentuk satu kementerian khusus yang menangani urusan ekonomi eksternal.<sup>47</sup> Kemudian cara lainnya adalah

---

<sup>44</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 203.

<sup>45</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 203.

<sup>46</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 203.

<sup>47</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 203.

dengan membentuk pengawasan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pekerjaan ekonomi eksternal.<sup>48</sup>

*Ketiga*, prioritas terhadap promosi ekspor dan investasi. Dalam faktor ini, beberapa lembaga resmi pemerintah memainkan peran penting sebagai fasilitator untuk memberikan akses bagi industri atau perusahaan dalam negeri untuk mencapai pasar baru. Dalam upaya promosi ekspor, Rana menjelaskan bahwa lembaga resmi pemerintah yang dalam hal ini adalah jaringan diplomatik baik itu kedutaan besar maupun lembaga resmi pemerintah lainnya harus mampu melakukan studi pasar, mengatur kunjungan delegasi bisnis, mengadakan pertemuan antara penjual dari dalam negeri dan pembeli dari negara tempat perwakilan diplomatik tersebut, serta memfasilitasi partisipasi dalam pameran dagang internasional.<sup>49</sup>

Untuk mobilisasi investasi, jaringan diplomatik baik kedutaan besar maupun lembaga resmi pemerintah lainnya harus melakukan dua langkah utama. Langkah pertama adalah menjangkau calon investor asing dan memberikan gambaran peluang di dalam negeri untuk menarik minat investor.<sup>50</sup> Langkah kedua adalah melakukan promosi yang menargetkan dorongan kepada investor untuk tetap yakin dan melakukan tindakan nyata dalam memberikan investasi di dalam negeri. Hal ini harus dikoordinasikan secara erat dengan asosiasi bisnis dan perusahaan swasta.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 203.

<sup>49</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

<sup>50</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

<sup>51</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

*Keempat*, kerangka regulasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemerintah yang dibantu dengan lembaga terkait untuk memajukan perdagangan dan investasi.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, Rana memberikan gambaran mengenai keterlibatan kamar dagang ataupun *think-tank*.<sup>53</sup> Rana juga menjelaskan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area-area prioritas diplomasi ekonomi untuk selanjutnya dapat dilakukan negosiasi perjanjian ekonomi yang diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.<sup>54</sup> Rana memberikan contoh instrumen perjanjian yang diperlukan seperti perjanjian perdagangan bebas, perjanjian perdagangan preferensial, dan perjanjian yang mengatasi hambatan non-tarif baik secara bilateral maupun regional.<sup>55</sup>

*Kelima*, pemanfaatan jaringan diplomatik secara maksimal. Sebuah negara harus memanfaatkan jaringan diplomatik mereka di bawah kementerian luar negeri secara terpadu dalam diplomasi ekonomi. Menurut Rana, hal ini menjadi sangat penting karena kondisi di lapangan (negara tujuan diplomasi ekonomi) itu tidak sama dan oleh karena itu beberapa negara yang mengesampingkan kementerian luar negeri dalam urusan diplomasi ekonomi cenderung mengalami hambatan.<sup>56</sup> Selain itu, Rana juga menjelaskan bahwa jaringan diplomatik harus didorong untuk terlibat aktif melakukan kegiatan promosi perdagangan yang dikomandoi oleh duta besar.<sup>57</sup> Kelima

---

<sup>52</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

<sup>53</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

<sup>54</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

<sup>55</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204.

<sup>56</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204-205.

<sup>57</sup> Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries." Hal. 204-205.

faktor kunci ini akan menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya perluasan pasar non-tradisional di kawasan Afrika.

Tabel 1.1 Komponen Kunci Keberhasilan Diplomasi Ekonomi Kishan S. Rana

No.	Komponen Kunci	Pengaplikasian
1	Inklusifitas Pendekatan Ekonomi Luar Negeri	Kelompok penasihat dari pebisnis, kelompok pebisnis untuk bertukar pikiran, dan pertemuan pemerintah, pebisnis, serta think tank dengan calon mitra diplomasi ekonomi.
2	Integrasi Struktur Urusan Luar Negeri dan Manajemen Ekonomi Eksternal	Lembaga khusus promosi perdagangan, kementerian urusan ekonomi eksternal, dan pengawasan terpadu terhadap urusan Ekonomi eksternal oleh pemerintah.
3	Prioritas Terhadap Promosi Ekspor dan Investasi	<i>Market study</i> , pertemuan pebisnis antar kedua negara, fasilitator pameran dagang Internasional, delegasi bisnis, promosi investasi.
4	Optimalisasi Kerangka Regulasi	Menentukan area-area prioritas, menggunakan instrumen perjanjian perdagangan bebas, perdagangan preferensial, dan hambatan non-tarif.
5	Optimalisasi Jaringan Diplomatik	Pemanfaatan jaringan diplomatik untuk menentukan upaya serta langkah yang tepat di negara tujuan dan melakukan promosi perdagangan.

Sumber: Rana K, *Diolah peneliti dari buku: The New Economic Diplomacy: Decision making and Negotiations in International Economic Relations Second Edition (2007)*, 202-205

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya nyata dalam perluasan pasar non-tradisional di Afrika salah satunya melalui pelaksanaan forum ekonomi politik antara Indonesia dan negara-negara Afrika (IAF). Forum yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2018 ini memberikan peluang konkret Pemerintah Indonesia untuk memperluas

akses pasar ke Afrika melalui upaya-upaya seperti perjanjian perdagangan yang telah dibahas dengan beberapa negara Afrika seperti Tunisia, Angola, Kenya, Afrika Selatan, dan Mozambik. Upaya ini telah membawa hasil yaitu berupa perjanjian *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dengan Mozambik guna mengurangi hambatan perdagangan dalam kegiatan perdagangan internasional antara kedua negara.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga membuka peluang akses pasar bagi perusahaan BUMN PT. Pertamina di bidang gas bumi dengan memfasilitasi perjanjian kerjasama pengembangan energi geothermal di Kenya. Kerjasama ini dilakukan dengan skema investasi senilai 1,5 miliar USD untuk pengembangan energi hijau terbarukan panas bumi di Kenya.<sup>58</sup> Selain dari upaya yang telah dijelaskan di atas, peneliti juga akan menggambarkan upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkait dengan upaya perluasan pasar non-tradisional Indonesia di Afrika yang akan dielaborasi dan dianalisi dengan menggunakan komponen kunci kesuksesan diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data dari berbagai sumber

---

<sup>58</sup> Kementerian ESDM. *Indonesia - Kenya Perkuat Kerja Sama Sektor Energi*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023

untuk membantu mendapatkan pemahaman yang mendalam dari subyek yang diteliti dan kemudian mendorong peneliti untuk memahami isu secara holistik. Dalam jenis penelitian ini, data yang dikumpulkan akan dieksplorasi secara induktif untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian mendeskripsikan serta menafsirkan kategori tersebut.<sup>59</sup> Untuk pengimplementasian jenis penelitian dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi sumber data yang berkaitan dengan upaya perluasan pasar non-tradisional Indonesia serta kategori-kategori yang telah dijelaskan dalam kerangka teori untuk menemukan progresivitas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perluasan pasar non-tradisional di Afrika.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan *output* penemuan-penemuan yang tidak bisa diukur dengan metode tradisional atau prosedur maupun cara-cara umum dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>60</sup>

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian yang ditulis dibatasi pada tahun 2014-2024, dimana pada periode waktu ini terdapat transisi kebijakan luar negeri Indonesia di Afrika dari yang sebelumnya bersifat idealis-multilateral yang dibuktikan dengan usungan New Africa-

<sup>59</sup> Nassaji, Hossein. "Qualitative and descriptive research: Data type versus." *Language Teaching Research*, 2015: 129-130.

<sup>60</sup> Lewis, Jane Ritchie dan Jane. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. (London: Sage Publications, 2003), 3.

Asia Strategic Partnership (NAASP) pada tahun 2005 yang justru tidak dioperasionalisasi dan diimplementasikan oleh kedua belah pihak. Pembatasan penelitian pada tahun 2014-2024 ini didasarkan pada jangka waktu kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang cenderung lebih melakukan pendekatan pragmatis di Afrika dengan beriorientasi pada hasil ekonomi konkret seperti yang diterapkan pada penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF).

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan entitas yang secara tunggal dan utuh dijadikan sebagai objek yang akan diteliti.<sup>61</sup> Mohtar Mas'oed dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi” menjelaskan bahwa unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, ataupun diramalkan.<sup>62</sup> Di dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah upaya diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi merupakan variabel independen atau unit yang menjelaskan perilaku dari unit analisis yang akan diamati.<sup>63</sup> Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perluasan pasar non-tradisional Indonesia di Kawasan Afrika. Sementara itu, tingkat analisis merupakan posisi atau tingkat dimana unit analisis atau interaksi aktor akan dijelaskan. Dalam penelitian ini, tingkat analisis berada pada tingkat negara untuk menjelaskan area penelitian yang akan dijelaskan.

---

<sup>61</sup> Chenail, Ronald J. “Conducting Qualitative Data Analysis: Reading Line by Line, but Analyzing by Meaningful Qualitative Units.” *The Qualitative Report*, 2012: 266.

<sup>62</sup> Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. ( Jakarta: LP3ES, 1990), Hal.39.

<sup>63</sup> Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Hal. 39.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan karena sumber utama dari penelitian yang digunakan sebagai bahan rujukan dan analisis merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh menggunakan metode penelaahan literatur secara sistematis dari berbagai sumber data yang ada seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, maupun laporan-laporan resmi pemerintah Indonesia ataupun laporan penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan data sekunder berupa laporan pemerintah seperti Siaran Pers Kementerian Investasi/BKPM mengenai penguatan investasi RI-Afrika, Siaran Pers Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional mengenai pelaksanaan Trade Expo Indonesia ke-38 yang secara khusus menyasar Afrika, Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional dimana satgas ini memiliki tugas mempercepat peningkatan nilai ekspor termasuk ke wilayah Afrika. Siaran Pers KBRI di Afrika melalui website Kementerian Luar Negeri RI tentang pelaksanaan *business matching*, serta beberapa laporan laporan resmi lainnya dari kementerian-kementerian bidang ekonomi dan juga Kementerian Luar Negeri RI.

---

<sup>64</sup> Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Hal. 211.

Selain dari laporan pemerintah, penelitian ini juga didasarkan pada kerangka konseptual yang bersumber dari buku “*The New Economic Diplomacy: Decision-Making Negotiation in International Economic Relations Second Edition*” dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal ilmiah untuk memperkuat argumentasi seperti “Diplomasi Ekomoomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019”, “Diplomasi Perdagangan Indonesia di Afrika Selatan (2015-2019): Upaya Peningkatan Perdagangan di Pasar Afrika Selatan”, “*Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015-2018: Challenges and Oppurtunities*”, “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo” dan beberapa jurnal ilmiah lainnya.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode melalui pengumpulan data dari sumber yang akurat yang kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, lalu dikategorisasikan menurut indikator-indikator yang telah ditetapkan, dan kemudian dirumuskan, lalu digeneralisasikan hingga menghasilkan kesimpulan dari pertanyaan penelitian melalui data-data yang ada dan telah diolah oleh peneliti. Metode ini dilakukan dengan tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan serta verifikasi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Qualitative Data Analyst*. (London: Sage Publication, 2014), Hal.20-22.

Pertama kondensasi data, tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis melakukan penyederhanaan atas data-data yang telah dikumpulkan. Data-data tersebut dikumpulkan dari *e-book*, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, laporan penelitian, video laporan berita, situs web, ataupun artikel berita yang berkaitan dengan upaya perluasan pasar non-tradisional Indonesia di Afrika yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan direduksi untuk membentuk ruang lingkup penelitian atas isu yang diangkat. Kedua, penyajian data. Tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis menyajikan data yang sebelumnya telah dihimpun dan kemudian akan dianalisis dengan kerangka pemikiran diplomasi ekonomi yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, penulis akan menggambarkan bagaimana upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar non-tradisional di kawasan Afrika dan kemudian akan dikategorisasikan berdasarkan indikator dari komponen kunci kesuksesan diplomasi ekonomi yang telah dijelaskan dalam kerangka konstptual untuk memberikan gambaran progresivitas upaya perluasan pasar non-tradisional Indonesia di Kawasan Afrika. Ketiga, kesimpulan dan verifikasi, setelah menganalisis menggunakan kerangka pemikiran yang di atas, kesimpulan serta verifikasi akan dapat ditarik berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan.

## 1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang yang diikuti dengan penulisan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang digunakan, metodologi penelitian yang berisikan

jenis penilitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan daya, teknik analisis data dan kemudian diikuti dengan sistematika penelitian.

## **BAB II Kepentingan Indonesia dalam Melakukan Perluasan Pasar Internasional**

Pada bagian ini, penulis akan mencoba menjelaskan dan menggambarkan mengapa Indonesia melakukan perluasan pasar internasional.

## **BAB III Perluasan Pasar Non-Tradisional Indonesia di Kawasan Afrika**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perluasan pasar di kawasan Afrika dan juga akan menggambarkan potensi-potensi ekonomi di kawasan ini.

## **BAB IV Diplomasi Ekonomi dalam Upaya Perluasan Pasar Non-Tradisional Indonesia di Kawasan Afrika**

Bab ini berisikan analisis terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperluas jaringan perdagangan internasional di Afrika menggunakan konsepsi diplomasi ekonomi dari Kishan S. Rana yang dijelaskan di bagian kerangka konseptual.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

